PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DESA KALICINTA KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Erna Sari dan Yulia Neta

ABSTRAK

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada desa untuk memiliki wewenang asli dalam mengatur rumah tangga sendiri. Desa juga memiliki kekuasaan sebagai pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Desa, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa*

A. PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah, di mana otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Di samping itu penyelenggaraan otonomi juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi aparat pemerintah, termasuk pemerintahan Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah yang paling rendah dalam hirarki pemerintahan di daerah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa menurut Pasal 1 Ayat

(12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lebih

lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Selain itu di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ayat (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Kemudian dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Tata pemerintahan desa menurut Marwoto Soewito (1999: 3) mengandung makna sebagai

kaidah dan tata aturan yang menjadi kerangka kerja maupun tata aturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lebih jauh tata pemerintahan desa mengandung bobot dan aspek-aspek sebagai berikut:

Administrasi pemerintahan desa

Administrasi pemerintahan desa adalah proses pelaksanaan dan penerimaan dalam wujud pencatatan, pelaporan dan kearsipan tentang segala kegiatan desa, baik keuangan, tanah, hukum adat, keamanan, pertahanan, sosial dan pendidikan. Yang kesemuanya itu dicatat dan diinventarisir melalui mekanisme administrasi perkantoran desa yang lazim disebut arsip dan kearsipan.

Administrasi pembangunan desa

Administrasi pembangunan adalah proses penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan pembangunan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya mengandung muatan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Administrasi pembinaan masyarakat

Administrasi pembinaan masyarakat adalah proses kegiatan pembinaan yang berwujud membina, mengarahkan, membimbing dan memberi contoh tentang perilaku administrasi yang baik dan benar terutama menyangkut pembangunan mental spiritual warga desa.

Manajemen desa

Manajemen desa memprioritaskan pada kerangka kerja sistimik dengan pendekatan model input – proses – output yang secara substansial mengacu pada pencapaian tujuan secara optimal. Model ini merupakan pengejawantahan kerja yang terarah dan teratur dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa.

Kepemimpinan desa

Kepemimpinan atau leadership memprioritaskan pada pola rekrutmen calon pemimpin desa, proses pemilihan konstitusional dan demokratis serta pemantauan kerja kepada desa, wujud dari itu tampilnya perilaku kepala desa yang sadar akan tugas, tanggung jawab dan hak sebagai kepala desa.

Secara internal dalam organisasi pemerintahan desa terdapat hubungan-hubungan kerja yang akan mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan desa yaitu:

- a. Kepala Desa dengan perangkat desa
- b. Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa
- c. Kepala Desa dengan Lembaga Adat/ Lembaga Kemasyarakatan

Secara eksternal terdapat pula hubungan kerja antara lain:

- a. Kepala Desa dengan Camat
- b. Kepala Desa dengan pemerintah kabupaten

Berdasarkan kondisi di atas, maka Sistem Pemerintahan Desa akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat hubungan kerja yang baik antara Kepala Desa dengan Lembaga yang ada dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa Kalicinta merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan sistem dan tata pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah belum lengkapnya peraturan pelaksanaan, lemahnya pemahaman Aparat Pemerintah mengenai Sistem Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perangkat Desa, dan sedikitnya sosialisasi oleh aparat pemerintah di atasnya mengenai terbitnya undang-undang yang baru.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pelaksanaan sistem pemerintahan di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, analisis data secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu kepada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dijelaskan bahwa susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa
- c. Sekretariat Desa
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan
 - i. Kepala Urusan Pemerintahan
 - ii. Kepala Urusan Pembangunan
 - iii. Kepala Urusan Umum
- d. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani
 - b. Kepala Seksi Keamanan
- e. Kepala-kepala Dusun

Kepala Desa

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. mendamaikan perselisihan dan ketertiban masyarakat desa;

- f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya sendiri;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
- c. melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya kepala desa:

- a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dalam rapat Baperdes;
- b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat;
- c. pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa yang bersangkutan. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Kepala Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman kepada kebutuhan desa yang telah disusun dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang), di mana dalam Rakorbang ini dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang lain melaksanakan upaya pelayanan kepada masyarakat dan juga membuat pelaporan tentang berbagai hal yang diminta oleh pemerintah di atasnya, baik kecamatan maupun kabupaten.

Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretaris desa berfungsi:

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya terutama di dalam

menyusun administrasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelayanan umum dan yang lainnya.

Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat desa dalam bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala urusan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara memiliki 3 orang kepala urusan yaitu:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan: Kepala Urusan Pemerintahan bertugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang di dalamnya juga mencakup kelengkapan peralatan dan perlengkapan bidang pemerintahan.
- b. Kepala Urusan Pembangunan: Kepala Urusan Pembangunan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan program-program yang sudah maupun belum dilaksanakan untuk diinventarisir dan disusun sesuai dengan prioritas program yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Kepala Urusan Umum: Kepala Urusan Umum bertugas melaksanakan pelayanan administrasi yang diperlukan warga masyarakat misalnya tentang pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat tanah, dan lain sebagainya.

Kepala Seksi Teknis Lapangan

Kepala teknis lapangan merupakan sebagai unsur teknis yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala teknis lapangan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Sebagai daerah dengan areal pertanian, dan juga perdagangan serta jasa, keberadaan Kepala Seksi Teknis Lapangan sangat diperlukan dalam rangka membimbing warga masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dusun

Unsur wilayah adalah kepala dusun. Jumlah kepala dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan dengan kondisi di desa. Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 5 (lima) dusun. Oleh karena itu jumlah kepala dusunnya juga 5 (lima) orang.

Kepala Dusun mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di dusunnya masing-masing dan melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar kehidupan dalam masyarakat di dusun tersebut aman, tentram dan sejahtera.

Sistem Pemerintahan Desa

Tata pemerintahan desa mengandung bobot dan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. administrasi pemerintahan desa: Administrasi pemerintahan desa adalah proses pelaksanaan dan penerimaan dalam wujud pencatatan, pelaporan dan kearsipan tentang segala kegiatan desa, baik keuangan, tanah, hukum adat, keamanan, pertahanan, sosial dan pendidikan. Yang kesemuanya itu dicatat dan diinventarisir melalui mekanisme administrasi perkantoran desa yang lazim disebut arsip dan kearsipan;
- b. administrasi pembangunan desa: Administrasi pembangunan adalah proses penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan pembangunan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya mengandung muatan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- c. administrasi pembinaan masyarakat: Administrasi pembinaan masyarakat adalah proses kegiatan pembinaan yang berwujud membina, mengarahkan, membimbing dan memberi contoh tentang perilaku administrasi yang baik dan benar terutama menyangkut pembangunan mental spiritual warga desa;
- d. manajemen desa: Manajemen desa memprioritaskan pada kerangka kerja sistimik dengan pendekatan model input – proses – output yang secara substansial mengacu pada pencapaian tujuan secara optimal. Model ini merupakan pengejawantahan kerja yang

terarah dan teratur dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa;

- e. Kepemimpinan desa: Kepemimpinan atau leadership memprioritaskan pada pola rekrutmen calon pemimpin desa, proses pemilihan konstitusional dan demokratis serta pemantauan kerja kepada desa, wujud dari itu tampilnya perilaku kepala desa yang sadar akan tugas, tanggung jawab dan hak sebagai kepala desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Selain itu di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Selain itu secara internal dalam organisasi pemerintahan desa terdapat hubungan-hubungan kerja yang akan mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan desa yaitu:

- a. Kepala Desa dengan perangkat desa;
- b. Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa;
- c. Kepala Desa dengan Lembaga Adat/ Lembaga Kemasyarakatan.

Secara eksternal terdapat pula hubungan kerja antara lain:

- a. Kepala Desa dengan Camat
- b. Kepala Desa dengan pemerintah kabupaten

Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Lain

Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sudah dibentuk Badan Perwakilan Desa (Baperdes) untuk masa bhakti 2004 – 2010 atau memiliki masa kerja selama 6 (enam) tahun). Selama ini Baperdes Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sudah melaksanakan tugasnya sebagai mitra dari kepala desa di dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Keuangan Desa

Sumber pendapatan Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota;
- d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang ditugaskan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu:

- a. kurangnya sosialisasi tentang terbitnya produk perundang-undangan yang baru mengenai sistem pemerintahan desa dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi baik kecamatan maupun kabupaten kepada perangkat desa, sehingga pemahaman para perangkat desa tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dari sistem pemerintahan masih kurang optimal;
- b. sumber daya manusia aparat pemerintahan desa yang masih kurang memadai, karena dari perangkat desa yang ada di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tidak ada yang berpendidikan Sarjana, rata-rata pendidikan mereka hanya SMA dan bahkan ada yang SMP dan SD. Hal ini menyebabkan wawasan dan pengetahuan mereka terbatas;
- c. lemahnya pengawasan dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi baik dari aparat kecamatan maupun kabupaten tentang pelaksanaan sistem pemerintahan, karena sangat jaranganya aparat pemerintahan yang lebih tinggi melakukan kunjungan kerja dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap jalannya pemerintahan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. sistem pemerintahan desa yang diterapkan di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sudah mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah walaupun belum optimal dalam pelaksanaannya;

- b. terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu:

- a) kurangnya sosialisasi tentang terbitnya produk perundang-undangan yang baru mengenai sistem pemerintahan desa dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi baik kecamatan maupun kabupaten kepada perangkat desa, sehingga pemahaman para perangkat desa tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dari sistem pemerintahan masih kurang optimal;
- b) sumber daya manusia aparat pemerintahan desa yang masih kurang memadai, karena dari perangkat desa yang ada di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tidak ada yang berpendidikan Sarjana, rata-rata pendidikan mereka hanya SMA dan bahkan ada yang SMP dan SD. Hal ini menyebabkan wawasan dan pengetahuan mereka terbatas;
- c) lemahnya pengawasan dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi baik dari aparat kecamatan maupun kabupaten tentang pelaksanaan sistem pemerintahan, karena sangat jaranganya aparat pemerintahan yang lebih tinggi melakukan kunjungan kerja dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap jalannya pemerintahan.

Saran

- a. hendaknya koordinasi antara perangkat desa dan unsur aparatur di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga akan dapat meningkatkan optimalisasi di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- b. hendaknya para pemuka adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat sebagai alat kontrol pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa agar dapat melakukan pengawasan dengan baik dan memberikan masukan apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat dari aparatur pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beverniste, Guy. 1994. *Birokrasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husin, Salman Tandjung. 2003. *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Bandung.
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1991. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soewito, Marwoto. 1999. *Profil Desa di Indonesia Wilayah Barat, Kajian Terhadap Desa Swadaya, Swakarsa, dan Swasembada*. STPDN Departemen Dalam Negeri. Bandung.
- Supriady, Dedu. 2001. *Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widjaja, AW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan di Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.